



PERATURAN NAGARI

Nomor 4 Tahun 2019

Tentang

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NAGARI**

(RPJM Nag)

TAHUN 2015– 2021

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

NAGARI SIGNTUR

TAHUN 2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Landasan Hukum	
1.3. Maksud dan tujuan	
1.4. Manfaat.....	
 BAB II PROFIL NAGARI	
2.1. Kondisi Nagari	
2.2. SejarahNagari	
2.3. Peta dan kondisi Nagari	
2.4. Kelembagaan Nagari	
2.5. Dinamika konfli	
2.6. Masalah dan potensi	
 BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM	
3.1. Pengkajian keadaan Nagari	
3.2. Musyawarah Nagari RPJM	
 BAB IV VISI DAN MISI DAN PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)	
4.1. Visi dan Misi	
4.1.1. Visi	
4.1.2. Misi	
4.2. Kebijakan Pembangunan	

*“TERBANGUNNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN NAGARI YANG BAIK DAN BERSIH
GUNA MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAGARI YANG ADIL, MAKMUR
DAN SEJAHTERA”*

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nagari

4.2.2. Program Pembangunan Nagari

4.2.3. Strategi Pencapaian

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Peta Sosial Nagari
2. Tabel (MATRIK) program/kegiatan enam tahun
3. Berita acara dan daftar hadir
4. SK tim penyusun RPJM Nagari

*“TERBANGUNNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN NAGARI YANG BAIK DAN BERSIH
GUNA MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAGARI YANG ADIL MAKMUR
DAN SEJAHTERA”*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap kampung dan kelompok sampai dengan musyawarah nagari dalam rangka menggagas masa depan nagari, tim penyusun yang terdiri dari Wali Nagari, Sekretaris Nagari, LPMN, Kepala Kampung, KPMN, Wakil Masyarakat, anggota Bamus dan Perangkat Nagari Siguntur Tua telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Siguntur.

RPJMNagari adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Nagari Siguntur yang menginginkan masa depan nagari yang lebih baik di segala bidang. Mimpi nagari akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi nagari dalam bentuk dokumen perencanaan nagari.

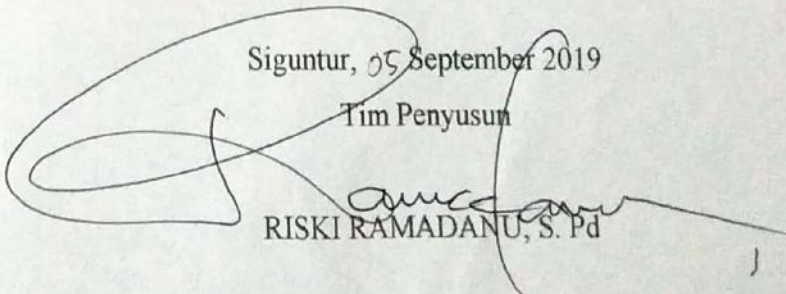
Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJM Nagari Siguntur tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJM Nagari ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Harapan kami semoga dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses pembangunan di Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dan semoga seluruh rencana pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJM Nagari Siguntur ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Nagari Siguntur.

Siguntur, 05 September 2019

Tim Penyusun


RISKI RAMADANU, S. Pd

"Terbangunnya tata kelola pemerintahan Nagari yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera"

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Nagari adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Nagari berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Nagari diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Nagari, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) ataupun Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Nagari (RKP Nagari).

RPJM Nagari Sguntur ini merupakan rencana strategis Nagari Siguntur untuk mencapai tujuan dan cita-cita Nagari. RPJM Nagari tersebut, nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan dan selaras dengan perencanaan tingkat Kabupaten. Selama ini dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Nagari untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Siguntur ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. Maksud Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari

Maksud diadakannya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi, serta program pemerintah Nagari dalam kurun waktu 6 (enam) tahun dalam melaksanakan proses pembangunan.
2. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diharapkan dalam melakukan proses pembangunan di Nagari, penyelenggaraan pemerintahan di Nagari, pemberdayaan masyarakat di Nagari, partisipasi masyarakat, penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat, operasional pemerintahan Nagari, tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Nagari, dan Intensif Kepala Kampung bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki Nagari setempat.
3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di Nagari yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

b. Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari

Adapun tujuan diadakannya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari adalah:

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan Nagari, strategi pembangunan Nagari, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan Nagari selama enam tahun kedepan.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program Nagari yang akan dibiayai oleh APB Nagari, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah Nagari terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) Nagari antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Uasul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Nagari;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;
16. Surat edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/591/SEPMDPKB;PS/2018 Tentang Rancangan penyusunan RPJM Nagari Tahun 2018-2024 dan RKP 2019

1.4 Manfaat

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat (APBNagari) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
2. Nagari atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah ketentuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban nagari tersebut.
4. Lembaga Masyarakat Nagari atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah nagari dalam memberdayakan masyarakat.
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari yang selanjutnya disebut (Musrenbang Nagari) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Nagari (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Nagari dan pihak akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Nagari 1 (satu) Tahunan.
6. Pembangunan Nagari adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperimbangkan sumber daya yang tersedia.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Perencanaan Pembangunan Nagari dimaksud adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di Nagari guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya nagari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu nagari dalam jangka waktu tertentu. Wujud perencanaan pembangunan nagari adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari selanjutnya disingkat RPJMNagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Nagari, arah kebijakan keuangan nagari, kebijakan umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
11. Rencana Kerja Pembangunan Nagari yang selanjutnya disingkat RKPNNagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMNagari yang memuat rancangan ekonomi Nagari, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Nagari, rencana kerja dan pendanaan disertai perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMNagari.



BAB II

PROFIL NAGARI

2.1 Sejarah Nagari

Sebelum Tahun 1918 Nagari Siguntur diperintah oleh raja-raja kecil yang masuk dalam pemerintahan kerajaan malayu / Pagaruyung dan pada zaman Belanda / Jepang diperintah oleh Penghulu Palo :

Berawal dari sejarah perjalanan nenek moyang dulu kala dari darek talang, cupak, tarung-tarung yang datang ke Pesisir bagian utara ke kanagarian Siguntur, khususnya nagari Siguntur Tua, rombongan nenek moyang ini berjalan turun dari darek menyusuri aliran sungai Batang Barus. Didalam perjalanan rombongan ini sebagian tinggal dan menetap ditaratak dan yang lainnya meneruskan perjalanan terus ke muara Batang Barus di Sungai Lundang ini adalah pertemuan dua batang sungai yaitu dengan batang Siguntur. Disini Rombongan ini terpecah menjadi dua, sebagian mengikuti aliran sungai terus ke hilir dan sebagian menyongsong (memudikan) aliran sungai Batang Siguntur tiba dan berdiam di Koto Gaek nagari Siguntur Tua sekarang ini. Dikala ini sesuai perkembangan manusia terus bertambah kepemimpinan di pegang oleh raja-raja.

Sebelum tahun 1918 Nagari Siguntur diperintah oleh raja-raja kecil yang masuk dalam pemerintahan kerajaan Melayu/Pagaruyung dan pada zaman Belanda/ Jepang di perintah oleh penghulu palo :

1. Penghulu Palo Maisin
2. Penghulu Palo Ayub
3. Penghulu Palo Gaek

Pada tahun 1948 terjadinya perjanjian renville dimana Siguntur terbagi menjadi dua bagian, yaitu Siguntur Muda dan Siguntur Tua, yang mana Nagari Siguntur Muda dimasukkan kedalam Kabupaten Padang – Pariaman, sedangkan Nagari Siguntur Tua tetap di Kabupaten Pesisir Selatan kerinci (PSK) dengan bukti adanya Tugu Renville sebagai pembatas antara kedua nagari tersebut.

Pada tahun 1950 diadakan perundingan antara kedua PEMKAB Padang – Pariaman dengan Pemerintah PSK (Pesisir Selatan Kerinci), maka Siguntur

dinyatakan sebagai daerah Otonom, karena waktu itu Siguntur adalah daerah Ekonomi kuat dengan hasil Gambir dan akhirnya bergabung dengan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Wali Nagari sebagai berikut :

1. Wali Nagari Bustami tahun 1950
2. Wali Nagari Buya M. Nur tahun 1955
3. Wali Nagari Tayar tahun 1957
4. Wali Nagari Mansar tahun 1960
5. Wali Nagari Buya Abusamah tahun 1962
6. Wali Nagari Salam tahun 1963
7. Wali Nagari M. Kasah tahun 1965
8. Wali Nagari M. Azis 1971
9. Wali Nagari M. Kasah 1975

Pada tahun 1980 terkaitnya peraturan pemerintah untuk menyeragamkan bentuk pemerintah terendah, maka nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat dijadikan Desa, oleh karena itu kenagarian Siguntur dipecah menjadi 5 desa dengan kepala desa sebagai berikut :

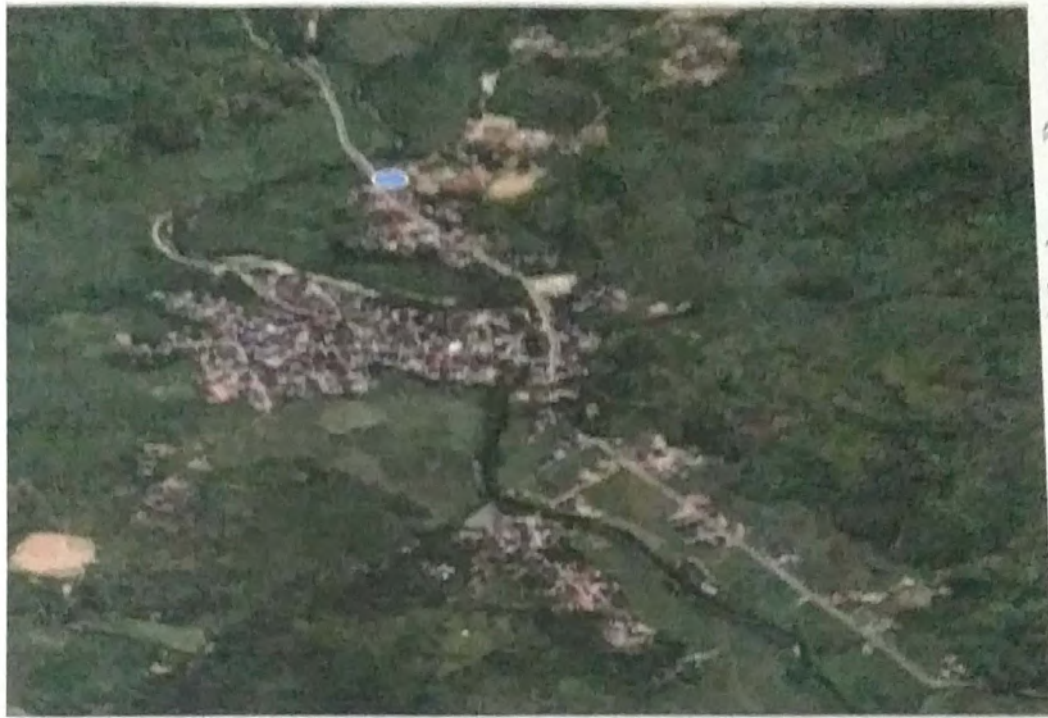
1. Desa Siguntur Muda dengan kepala desa M. Yusuf Rj. Magek
2. Desa Siguntur Tua dengan kepala desa Abu Amas
3. Desa Sungai Lundang dengan kepala desa Adnan
4. Desa Desa Baru dengan kepala desa Yusuf
5. Desa taratak dengan kepala desa Bakhtiar

Pada tahun 1990 desa Siguntur Tua digabung menjadi satu dengan Desa Siguntur Muda, dikarenakan Nagari Siguntur Tua tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi subuah pemerintahan. Tergabungnya kedua nagari tersebut di jabat oleh Kepala Desa Drs. Ridwan M. Noer. Pada tahun 2002 Siguntur kembali Kanagari dengan PJS Wali Nagari M. Yusuf Rj. Magek dan pada tahun 2003 Wali Nagari terpilih Drs. Ridwan M. Noer, pada tahun 2007 PJS Wali Nagari dijabat oleh Syafrul dan tahun 2008 Wali Nagari terpilih dijabat oleh Sasriadi.

Pada tahun 2011 berdasarkan aspirasi dan keinginan dari masyarakat Siguntur Tuo, bahwasanya jorong Timbulun dan Tarandam supaya dapat dimekarkan dari pemerintah nagari Siguntur, untuk membentuk pemerintahan sendiri dengan Pejabat Wali Nagari Sementara (PJS) Syafrul dan Wali Nagari

Pada Tahun 2015 habis masa jabatan pada periode Sasriadi, MA, Herpendi, ST diangkat menjadi Wali Nagari Siguntur karena kepercayaan masyarakat yang mampu untuk membangun Nagari.

2.2 PETA DAN KONDISI NAGARI



2.2.1 . Kondisi Nagari

a. Keadaan Fisik/Geografis Nagari

Secara geografis Nagari Siguntur terletak diantara $100^{\circ} 25' 446.005''$ BT - $100^{\circ} 28' 48.576''$ BT dan diantara $1^{\circ} 3' 22.383''$ LS - $1^{\circ} 7' 35.434''$ LS dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : berbatasan Kabupaten Solok
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Sungai Pinang
- Sebelah timur : berbatasan dengan Siguntur Tua
- Sebelah barat : berbatasan dengan Kodya Padang

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Nagari Siguntur Tua yaitu 495,76 hektar, yang terdiri dari:



1.	Pemukiman	:	65	hektar
2.	Ladang	:	825	hektar
3.	Sawah	:	2,5	hektar
4.	Perkebunan	:	-	hektar
5.	Hutan	:	-	hektar
6.	Hutan Adat	:	-	hektar
7.	Industri dan Pergudangan	:	0,082	hektar
8.	Kebun Campur	:	315,820	hektar
9.	Kesehatan	:	0,018	hektar
10.	Lahan Terbuka/Tanah Kosong	:	1,490	hektar
11.	Pendidikan	:	1,320	hektar
12.	Perkantoran	:	0,450	hektar
13.	Sungai	:	11,360	hektar
14.	Transportasi	:	0,960	hektar

c. Keadaan Topografi Nagari

Secara umum keadaan topografi Nagari Siguntur merupakan daerah perbukitan agak terjal, banyak batuan yang jalurnya mudah ditempuh serta dataran rendah yang memiliki kondisi tanah yang subur yang di dominasi tanaman kakao, pisang, mangga, jengkol, petai, durian, dan gambir. Sedangkan untuk wilayah persawahan panen bisa 2 (dua) kali setahun. Berdasarkan topografi tersebut maka sebagian besar masyarakat Nagari Siguntur bekerja sebagai petani.

d. Iklim Nagari

Sebagaimana nagari-nagari lain di wilayah Indonesia yang terdiri dari 2 (dua) iklim yaitu iklim kemarau dan penghujan, iklim di Nagari Siguntur juga terdiri dari 2 (dua) iklim tersebut. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

e. Orbitasi Nagari

Akses keibukota kecamatan	Aksesibilitas (kondisijalan)	Rusak Ringan
	Jarak	27 Km
	Waktu tempuh	25 Menit
	KendaraanUmum	Motor, Mobil
	Tarif rata-rata	Mobil : Rp15.000,-
Akses keibukota Kabupaten	Aksesibilitas (kondisijalan)	Rusak Ringan
	Jarak	44 Km
	Waktu tempuh	1 Jam
	KendaraanUmum	Mini Bus
	Tarif rata-rata	Mobil : Rp 25.000,-
Akses keibukota Provinsi	Aksesibilitas (kondisi jalan)	Rusak Ringan
	Jarak	30 Km
	Waktutempuh	1 jam
	KendaraanUmum	Mini Bus
	Tarif rata-rata	Mobil: Rp 25.000,-

2.2.2 Keadaan Sosial

a. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Nagari Siguntur Tua adalah = 960 jiwa, terdiri dari :

Laki – Laki : 1361 Jiwa

Perempuan : 2045 Jiwa

Jumlah Penduduk

: 3406 Jiwa

b. Pendidikan

Adapun pendidikan Penduduk Nagari Siguntur tua adalah sebagai berikut:

1. Akademi/Diploma III/S. Muda : 5 Orang
2. Diploma I/II : Orang
3. Diploma IV/ Strata I : 26 Orang
4. SLTA/Sederajat : 352 Orang
5. SLTP/Sederajat : 195 Orang
6. Strata II : 0 Orang
7. Tamat SD/Sederajat : 352 Orang
8. Tidak Tamat SD/Sederajat : 19 Orang
9. Tidak/Belum Sekolah : 112 Orang

c. Lembaga Pendidikan

1. SD/MI : 1 (satu) buah / SD 34 Siguntur Tua
2. SMA/SMK :

d. Kesehatan

1. Kematian Bayi
 - Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 0 Orang
 - Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 40 Orang
2. Kematian Ibu Melahirkan
 - Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 40 Orang
 - Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 Orang
3. Cakupan Imunisasi
 - Cakupan Imunisasi Polio 3 : Orang
 - Cakupan Imunisasi DPT-1 : Orang
 - Cakupan Imunisasi Cacar : Orang
4. Gizi Balita

- Jumlah Balita	747 Orang
- Balita gizi buruk	Orang
- Balita gizi baik	Orang
- Balita gizi kurang	Orang

5. Pemenuhan air bersih

- Pengguna sumur galian	0 KK
- Pengguna air PAM	600 KK
- Pengguna sumur pompa	0 KK
- Pengguna sumur hidran umum	0 KK
- Pengguna air sungai	50 KK

c. Keagamaan

Data keagamaan Nagari Siguntur Tua Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pemeluk Agama

- Islam	3406 Orang
- Katolik	- Orang
- Kristen	- Orang
- Hindu	- Orang
- Budha	- Orang

2. Tempat Ibadah

- Masjid	2 Buah
- Mushalla	9 Buah
- Gereja	- Buah
- Pura	- Buah
- Vihara	- Buah

2.2.3 Keadaan Ekonomi

Pada Umumnya masyarakat Nagari Siguntur bekerja sebagai petani. Hal ini dapat dilihat dari luasnya lahan pertanian yang terdapat di Nagari Siguntur Tua. Adapun hasil utama pertaniannya yaitu padi.

Sumber pendapatan dan penghasilan masyarakat Nagari Siguntur Tua yaitu sebagai berikut:

a. Pertanian

1. PadiSawah	: 25 ha
2. Palawija	: 0 ha
3. Kakao/ Coklat	: 0 ha
4. Durian	: 4 ha
5. Karet	: ha
6. Kelapa	: 2 ha
7. Gambir	: 65 ha

b. Peternakan

1. Kambing	: ekor
2. Sapi	: ekor
3. Kerbau	: ekor
4. Ayam	: ekor
5. Itik	: ekor
6. Lain-lain	: ekor
7.	

c. Mata Pencaharian

1. Bidan	: 2 Orang
2. Buruh Harian Lepas	: 10 Orang
3. Nelayan	: 3 Orang
4. Petani/Pekebun	: 450 Orang
5. Dosen	: 1 Orang
6. Imam Mesjid	: 17 Orang

7. Karyawan Honorer	: 26 Orang
8. Mekanik	: 2 Orang
9. Pedagang	: 35 Orang
10. Pegawai Negeri Sipil	: 31 Orang
11. Penata Rambut	: 2 Orang
12. Peternak	: 0 Orang
13. Sopir	: 53 Orang
14. Tentara Nasional Indonesia	: 2 Orang
15. Tukang Batu	: 8 Orang
16. Tukang Jahit	: 2 Orang
17. Tukang Kayu	: 1 Orang
18. Tukang Las	: 2 Orang
19. Wiraswasta	: 10 Orang

2.3 KELEMBAGAAN NAGARI

Adapun kondisi Pemerintahan Nagari Siguntur yaitu sebagai berikut:

a. Lembaga Pemerintahan

Jumlah Perangkat Nagari :

1. WaliNagari	: 1 Orang
2. Sekretaris Nagari	: 1 Orang
3. Perangkat Nagari	: 10 Orang
4. BAMUS Nagari	: 5 Orang

b. Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPMN	: 35 Orang
2. PKK	: Orang
3. Poskesri	: 2 Unit
4. Pengajian	: 2 Kelompok
5. Arisan	...Kelompok
6. Kelompok Tani	: 3 Kelompok
7. Gapoktan	: 1 Kelompok
8. KarangTaruna	: 1 Kelompok

c. Pembagian Wilayah

1. Kampung Jirat : 293 KK

2. Kampung Koto : 374 KK

d. Struktur Organisasi Nagari

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH
NAGARI SIGUNTUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NAMA-NAMA PERANGKAT NAGARI:

- | | |
|---|---------------------------|
| a. Wali Nagari | : Herpendi, ST |
| b. Sekretaris Nagari | : Syafrul, S. IP |
| c. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum | : Sitri Yulivia, SE |
| d. Kepala Urusan Keuangandan Perencanaan | : Putri Wahyuni, S. Pd |
| e. Kepala Seksi Pemerintahan | : Riski Ramadhanu, S. Pd |
| f. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan | : Yandri Kiswanto, S. Kom |
| g. Bendahara Nagari | : Melsi Noliati, S. Pd |
| h. Kepala Kampung | |
| - Kepala Kampung Koto | : Artion |
| - Kampung Siguntur Jirat | : Wendi Permana |
| i. Staf Nagari | |
| - Staf Nagari | : Rezi Saputra |
| - Staf BAMUS Nagari | : Gusmayanti, A. Md |

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI SIGUNTUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN (BAMUS) NAGARI

- | | |
|----------------|----------------------------|
| a. Ketua | : Erianto, S. Ag |
| b. Wakil Ketua | : Zulbaidah, S. Pd |
| c. Sekretaris | : Junaidi Fendri, S. Pd. I |

d. Anggota

: 1. Pendriatno

2. Firdaus

POTENSI DAN MASALAH

Potensi

Jika ditinjau dari segi sumber daya alam Nagari Siguntur sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam bagus, karena di Nagari ini banyak memiliki sumber daya alam berupa perkebunan gambir, serta lahan pertanian yang begitu subur dimana semuanya itu siap untuk diolah.

Dalam segi pertanian, masyarakat Nagari Siguntur tidak lagi kekurangan beras sebagai bahan makanan pokok, disebabkan lahan pertanian yang siap diolah oleh para petani.

Dari sisi pengembangan Usaha Masyarakat Nagari Siguntur juga tidak ketinggalan dengan nagari-nagari lainnya karena didalam nagari ini juga terdapat masyarakat sebagai pelaku usaha walaupun dalam skala kecil, mengingat modal yang dimiliki juga kecil sehingga besar kecilnya suatu usaha tergantung pada besar kecilnya modal yang dimiliki.

Nagari Siguntur juga memiliki produk unggul nagari, yaitu berupa Rakik Kacang dan Rakik maco yang terbuat dari bahan dasar beras. Dimana bahan dasarnya pun diperoleh dari dalam nagari sendiri.

Demikianlah gambaran potensi yang ada di Nagari Siguntur baik itu potensi Sumber daya Alam (SDA) maupun potensi Sumber daya Manusia (SDM).

Masalah

Nagari Siguntur yang memiliki masyarakat yang mayoritas petani dengan tingkat pendidikan masih rendah tentu banyak memiliki kendala dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, begitu permasalahan yang hubungannya dengan sarana umum atau infrastruktur sosial maupun hubungannya dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat serta peningkatan kapasitas masyarakat serta pemenuhan segala kebutuhan hidup sehari-hari.

Adapun masalah yang dihadapi masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Jalur transportasi yang masih belum mendukung sehingga masyarakat susah dalam memobilisasi dari pada hasil-hasil pertanian mereka.
- b. Jalur transportasi yang ada hanya satu sehingga masyarakat rata-rata membuka lahan perkebunan terfokus pada satu arah satu tempat, mengingat sedikit ada kemudahan dalam mengangkut hasil pertanian. Sementara masih banyak lahan-lahan yang belum dikelola dengan baik.
- c. Kurang sarana air bersih.
- d. Tidak adanya sarana kesehatan yang memadai
- e. Tidak adanya sarana pendidikan anak usia pra sekolah.
- f. Kurang modal usaha yang dimiliki oleh masyarakat
- g. Tidak adanya saluran-saluran pembuangan air seperti drainase sehingga jika hujan lebat sudah datang maka pemukiman warga sebagian terancam banjir.
- h. Sering bermasalahnya lampu penerangan didalam Nagari karena kurangnya perawatan yang memadai.
- i. Tidak stabilnya harga pertanian
- j. Merosotnya harga gambir
- k. Data profil dari belum lengkap

Masalah dan Potensi

Rekapitulasi Masalah dan Potensi

No	Masalah	Lokasi/Dusun	Potensi
1	Masih Adanya warga yang belum mendapatkan sarana air bersih	Nagari	• Mata Air • Sungai • Perpipaian

2	Banyak masyarakat terjangkit penyakit yang tergolong 10 Variabel penyakit umum	Nagari	• Puskesmas Plus • Para Medis • Kader • Askeskin
3	Musim Tanam Padi Tidak Teratur	Nagari	• Air/Dam • Saluran Irigasi • Alat Bajak • Lahan Pertanian • Petani
4	Banyaknya hama padi pada saat mulai berbuah	Nagari	• Padi • Petani • Pola tanam
5	Masih adanya masyarat yang jual gabah langsung	Nagari	• Buruh Tani • Pedagang • Harga yang tinggi
6	Musim Tanam Tidak Teratur	Nagari	• Buruh Tani • Pedagang • Harga yang tinggi
7	Harga gambir tidak stabil	Nagari	• Kebun gambir • petani
8	Harga palawija dan hortikultura tidak stabil	Nagari	• Hasil panen • Pedagang /pembeli • Pasar • pemasaran
9	Harga pupuk melambung tinggi	Nagari	• kelompok Tani • Gapoktan • RDKK • KUD
10	Sering terjadi kesalah pahaman antar warga petani pada saat pembagian air irigasi	Nagari	• Petani • Jadwal suplay air
11	Jalan ekonomi tidak memadai	Nagari	• Swadaya • Pasir • Kerikil • Batu kali
12	Jalan Usaha tadi belum memadai	Nagari	• Pasir • Kerikil • Batu kali

13	Sampah menumpuk di sembarang tempat	Nagari	• Lahan • Pekarangan • swadaya
14	Penataan lingkungan rumah kumuh tidak teratur	Nagari	• Rumah warga • Masyarakat • Parit
15	Saluran irigasi tidak memadai	Nagari	• Petani • Air • Kelompok Pengguna air • Gotong royong
16	Sumber mata air belum dimanfaatkan secara maksimal	Nagari	• Mata air • Sarana perpipaan
17	Masih ada masyarakat B.A.B disungai	Nagari	• Swadaya • Parit • Lahan
18	Banyak balita diserang penyakit batuk dan flu	Nagari	• Pustu • Poskesdes • Balita • Kader posyandu • Paramedis
19	Adanya Balita Gizi Buruk / kurang	Nagari	• Pustu • Poskesdes • Balita • Kader posyandu • Paramedis
20	Belum ada gedung Posyandu	Nagari	• Balita • Kader Posyandu • Swadaya • Bumil • Bulin
21	Profil Nagari belum Lengkap	Pemerintahan Nagari	• Tenaga teknis
22	Ternak masih berkeliaran	Nagari	• Ternak • Kandang • Kelompok ternak • Lahan pertanian

23	Banyak masyarakat miskin tinggal dirumah tidak layak huni	Nagari	Raskin Rumah warga Lahan pekarangan Rumah tangga baru
24	Masih ada masyarakat yang buta aksara dan drop out	Nagari	Sekolah Guru Majelis ta'lim Toga & Tomas
25	Konflik antar keluarga	Nagari	Babinsa Babinkamtibmas Pemdes BPD LPM Toga & Tomas
27	Pengelolaan galian C tidak teratur	Nagari	Buruh Lahan warga Masyarakat
28	Fasilitas kantor Wali Nagari belum memadai	Pemerintahan	Kantor desa Lahan Swadaya
29	Angka pernikahan dini masih tinggi	Nagari	Remaja Prog KB PL KB PUS Penghulu Toga/ Toma
30	Jalan lingkungan / gang rusak parah	Nagari	Jalan /gang Perumahan Swadaya
31	Gapura batas belum dibuat	Nagari	Batu kali, pasir, kerikil dan swadaya
32	Sumber daya manusia lembaga – lembaga Nagari kurang	Nagari	Aparat,sarana tersedia
35	Pengurus BUM-NAG tidak aktif	Bum-nag	Modal usaha Pengurus
36	Sekretariat BUM-NAG tidak ada	Nagari	Modal usaha Pengurus AD/ART
37	Pengurus Gapoktan tidak aktif dan program kegiatannya tidak ada	Nagari	Kelompok tani Areal pertanian Pternakan
38	PRofil desa belum ada	Nagari	Ada Tenaga Tekhnis

. PERSIAPAN

Agar Penyusunan RPJM Nagari dilakukan dengan baik dan terarah sesuai dengan kewenangan Nagari maka mekanisme penyusunan sesuai Permendagri 114 Tahun 2014 dilakukan Musyawarah Nagari dalam rangka pembentukan Tim Penyusun RPJM Yang beranggotakan 7 orang terdiri dari ;

- Pengarah : HERPENDI, ST (WALI NAGARI)
- Ketua : SYAFRUL (SEKRETARIS NAGARI)
- Sekretaris : NANANG PRIBADI (KETUA LPMN)
- Anggota : 1. SUARDEDI
2. JUFRIZAL
3. RISKI RAMADANU, S. Pd
4. RENI ERMAYUNITA
5. ARTION

Setelah pembentukan tim tersebut diberi arahan dan pembekalan

PENYELARASAN

Rencana jangka menengah sebelum nya adalah RPJM Nagari yang berpedoman pada permendagri Nomor 66 Tentang RPJM diselaraskan dengan Permendagri 114 tahun 2014 dengan meengacu RPJM, Rencana Strategi SKPD ,Rencana umum tata ruang wialayah maupun kawasan pedesaan Kabupaten Pesisir Selatan

3.1 PENGKAJIAN KEADAAN NAGARI

Proses penyusunan RPJM dilakukan pengkajian mulai dari tingkat kampung dengan melakukan penggalian dan identifikasi masalah dan potensi baik melalui musyawarah Nagari maupun musyawarah perkelompok dengan menggunakan tiga alat kaji (metode Pra yaitu , kalender musim, peta sosial dan kelembagaan)

➤ Analisa Kalender Musim

NO	POTENSI	MASALAH
1	Sumber mata air , sumur gali	Kekurangan air bersih
2	Tenaga Kerja	Upah tenaga kerja sangat tinggi
3	Lahan pertanian	Tidak teratur Musim Tanam
4	Petani, sawah	Jual padi
5	Hasil produksi pertanian melimpah	Harga panen petani tidak stabil
6	Irigasi Teknis	Musim kemarau terjadi penurunan debit air
7	Kelompok Tani, Gapoktan	Pupuk dan obat-obatan mahal
8	Padi, petani, pola tanam	Setiap tahun diserang hama dan penyakit

9	Puskesmas, paramedis, kader	Setiap tahun masyarakat terjangkau penyakit yang tergolong 10 Variabel
---	-----------------------------	--

➤ Analisa Peta Sosial Desa

Potensi berdasarkan Peta Sosial Desa.

N O	POTENSI	VOLUME	MASALAH
1	Gedung Sekolah : ➤ RA/TK dan PAUD ➤ SD / Mi ➤ SMP / MTs ➤ SMA	1 1	Kreatif guru kurang, murid kurang Tempat istirahat, jamban, dan lapangan olah raga tidak memadai
	Masjid	1	Kurang kehadiran masyarakat dalam kegiatan keagamaan

Penggilingan padi	1	
Populasi ternak : ➤ ayam ➤ Sapi ➤ Kambing ➤ itik	270 86 159 500	ternak masih berkeliaran dan tidak adanya pemahaman masyarakat tentang tata cara berternak yang baik
Lahan sawah	19,52	Setelah musim panen sawah sering dibiarkan terlantar sebelum masa tanam berikutnya
Kebun	1.269,95	
Semak belukar	2,78	
Hutan	471,02	
Pemukiman	5,6	
Kuburan	1,23	
Drainase	3	Masih banyak yang jaringan yang

			rusak
	Kantor Wali Nagari	1	Fasilitas kurang memadai
	Balai pertemuan	1	
	Penduduk :		
	➤ Laki	511	
	➤ Perempuan	449	
	➤ RTM	3406	
	➤ Jumlah KK	253	
	Posyandu	4	

➤ Kelembagaan (Diagram Veen)

NO	POTENSI	VOLUME	MASALAH
1	Kantor Desa	1	Fasilitas kurang lengkap
	Pondok Pesantren	1	Sarana dan Prasarana tidak len
	BPD	1	Kurang memahami,tentang pembuatan peraturan Nagari

	LPM	1	Kurang aktif, organisasi tidak berjalan
	Karang Taruna	1	Kurang aktif, kegiatan tidak terorganisir
	PKK	1	Pembiayaan program kegiatan terbatas
	Kelompok SPP	1	Modal usaha sangat terbatas
	Remaja Masjid	5	Tidak aktif dan tidak berjalan nya kegiatan
	TPQ	6	Belum tempat yang permanen
	Poyandu	0	Belum tempat yang permanen
	Majelis Ta'lim	3	Kurang terorganisasi
	Kelompok Tani	3	Kurang aktif Akses informasi terbatas
	Kelompok Arisan		Belum terdata

Dari alat kaji tersebut akan dapat memberikan gambaran baik masalah maupun potensi yang ada di dusun kemudian dianalisa secara mendalam oleh forum musyawarah yang difasilitasi oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) untuk dirangkum menjadi gagasan / usulan dusun. Adapun hasil atau Gagasan masing – masing dusun sebagai berikut :

Rekapitulasi Gagasan Hasil Pertemuan di Dusun

No	Lokasi	Masalah
		1. Urusan Wajib
		1.1. Urusan wajib pendidikan sbb:
1	Jirat	Gedung SD 29 sudah rusak
2	Nagari	Tidak adanya Taman Bacaan (Pustaka) di Nagari
3	Nagari	Masih kurangnya Ruang Belajar dan sarana prasarana PBM di SMPN 5- SD 14 TK/PAUD
4	Nagari	Masih tingginya angka anak putus sekolah dan pengangguran
5	Jirat	Kurangnya Fasilitas Sekolah SD No 14

6	Jirat	Jembatan Menuju SD No. 29 rusak
7	Koto	SD 43 Tidak punya air bersih
8	Jirat	Kurangnya Mobiler TK/Paud
9	Jirat	Perbaiki Pagar SD 29
10	Jirat	Sarana Prasarana SD dan SMP
12	Jirat	Bantuan alat Kesenian
13	Nagari	Bantuan untuk Pelejar dan Mahasiswa Berprestasi
14	Nagari	Lisensi Untuk Pelatih SSB
15	Nagari	Peningkatan Sanggar Seni
16	Nagari	Pelatihan Seni Al-qur'an Untuk Guru TPA
17	Nagari	Pelatihan Perbengkelan, Sulam, tata rias dan Tata boga
		1.2. Urusan wajib Kesehatan sbb:
1	Nagari	Tidak adanya gedung Poskesri di Kampung Koto dan Kampung Jirat
2	Nagari	Tiap tahun banyak anak-anak RTM/Yatim yang akan disunat

3	Nagari	JAMKESMAS/JAMKESDA
4	Nagari	Masih adanya RTM, tinggal di rumah tidak layak huni
5	Jirat	Rehab bangunan Pustu
6	Jirat	Pembuatan pagar pustu dan penanaman pohon lindung
7	Jirat	Pemberian makanan tambahan untuk balita dan bumil di Posyandu
8	Jirat	Penambahan sarana alat-alat kesehatan
9	Jirat	Penambahan sarana alat-alat kesehatan seperti: meja dan kursi untuk pos ya posyandu, PARTUS SET (minimal 2x setahun)
10	Jirat	Penempatan Dokter pada Pustu
11	Nagari	Pemerataan Kartu Sehat BPJS dan Lain-lain
12	Nagari	Pembangunan Gedung Puskesmas

13	Nagari	Pelatihan Kader
		1.3. Urusan Wajib Sarana Prasarana sbb:
1	Koto	Pembuatan Jamban
2	Nagari	Tidak adanya Plang Pengumuman Larangan MCK
3	Jirat	Jalan di Depan Kantor Wali Nagari ke SMP rusak
4	Jirat	Jalan ke sawah liek dalam keadaan rusak
5	Nagari	Belum Tersedianya Plat Nomor Rumah Penduduk
6	Jirat	Pembenahan Gedung Kantor Wali
7	Nagari	Tidak tersedianya rambu-rambu jalan masuk koto, SD 14, SMP dan TK
	Jirat	

8		Belum adanya sarana penghubung SD 14 dengan Mushalla Babussalam
9	Nagari	Belum memadai sarana jalan usaha tani
10	Jirat	Jalan pemukiman kurao indah rusak
11	Nagari	Belum adanya Drainase Kantor KAN, Gedung Serbaguna, TK/PAUD
12	Jirat	Belum teralirnya listrik ke Lapangan Bola Kaki Baliak Torai
13	Koto	Belum adanya Pagar Pembatas Pandangan di Lubuak Bonai
14	Jirat	Parit miring Kantor Wali Nagari sudah rusak
15	Jirat	Belum tersedianya sarana air bersih ke tanah melayu
16	Nagari	Belum memadai sarana irigasi
17	Nagari	Di Pinggir Sungai Banyak terbing yang runtuh

18	Nagari	Sarana air bersih sudah rusak
19	Nagari	Belum tersedinya Drainase di masing-masing Kampung
20	Nagari	Jalan Koto ke Sawah Liek belum tersambung
21	Nagari	Belum adanya kantor KAN Siguntur
22	Nagari	Belum ada gerbang pembatas Nagari
23	Nagari	Penerangan Lampu jalan Nagari
24	Koto	Perlunya rehab jalan sabalik Koto (Permanen)
25	Nagari	Belum adanya gedung SMA/SMK
26	Koto	Belum sempurnanya sarana olah raga (lapangan Bola Kaki, dll)

27	Koto	Jembatan Baliak Torai ke Patai
28	Nagari	Belum adanya profil nagari
29	Jirat	Renovasi Bangunan Pos Keamanan yang Kurang Layak Pakai
30	Nagari	Belum adanya Bangunan Kantor Bamus Nagari
31	Nagari	Masih kurangnya insentif untuk Pegawai Pemerintahan Nagari/BAMUS/LPMN
32	Nagari	Honor kader mohon dinaikan
33	Jirat	Terganggunya Akses Jalan Perkebunan Masyarakat kekura
34	Jirat	Banyaknya lahan pertanian yang tidak tergarap akibat kekurangan pengairan
35	Jirat	Lahan pertanian sawah rumah gadang terancam tidak tergarap
36	Jirat	Pemeliharaan Aset Nagari
37	Jirat	Kurang Lancar pengairan sawah jalan kalawik
38	Jirat	Jembatan Gantung Penghubung Kampung jirat dan Kampung Koto
39	Jirat	Pengairan sawah kelok tidak Produktif
40	Jirat	Tebing sawah galanggang kasiak runtuh karena gerusan air sungai
41	Koto	Kurang lancar Pengairan sawah air kaçak
42	Koto	Terancamnya pemukiman warga karena banjir air sungai
43	Koto	Tali Banda sawah patai tidak berfungsi

44	Koto	Pengairan sawah lua tidak lancar
45	Nagari	Sering terjadinya kebakaran
46	Nagari	Lapangan bola kaki tidak memenuhi standar
47	Nagari	Sering terjadinya banjir
48	Nagari	Peralatan Pengolahan Usaha Gambir
49	Nagari	Pembinaan Seni Rabana Zikir dan Rasanji
50	Koto	Tali Banda Sawah Mudiak Rusak
51	Koto	Batu Baronjong / Dam Kampung Tanjung akibat Gerusan air Batang Siguntur
52	Koto	Drainase Kampung Bukik
53	Koto	Penambahan Jaringan air bersih subarang
54	Koto	Drainase Kampung Balai
55	Jirat	Banyak tebing yang runtuh di sungai batang tarusan
56	Jirat	Sarana air bersih sungai sariak dalam keadaan rusak
57	Jirat	Intek sarana air bersih Kurao dalam keadaan rusak
58	Jirat	Jalan Setapak kesnguai sariak
59	Jirat	Kurangnya mobiler SD 43

60	Jirat	Belum Adanya Pustaka Dan Aula SD 43
61	Jirat	Mobiler Kantor BAMUS dan Ruangan Kantor Wali nagari
62	Jirat	Jl, Setapak Tanah melayu
63	Jirat	Parit Miring Belakang Kantor Wali Nagari
64	Jirat	Tebing Sungai Sariak banyak yang runtuh
65	Jirat	Jalan Lingkung Kurao
66	Nagari	Drenase kampung Koto dan Jirat
67	Jirat	Pembangunan jembatan Gantung kampung koto , Jirat
68	Koto	Peningkatan jalan Baliak Torai
69	Koto	Perbaikan sarana Olah Raga
70	Jirat	Pembenahan Halaman TK
71	Jirat	Pasdam Surau Gadang
77	Jirat	Pembangunan Jembatan Usaha Tani karang Janjang
78	Nagari	Peningkatan Drainase Jalan
79	Jirat	Pembangunan Jembatan Gantung usaha tani Kurao

80	Nagari	Pembenahan Saluran Air kampung koto dan Kampung Jirat
81	Jirat	Rehab Halaman dan Pagar Kantor wali
82	Nagari	Pembangunan Pagar Pembatas Makam
83	Nagari	Pembuatan PAM Sibingkeh ke sawah Ilek
84	Nagari	Pengecoran Jalan Setapak Kampung Koto dan Jirat
85	Nagari	Pembangunan jalan Tembus dari jembatan palimauan ke air tanjung
86	nagari	Pembangunan pagar beton pasar pagi
87	nagari	Pembangunan jembatan dari baliak torai ke sawah patai
88	Koto	Pembangunan parit miring lapangan bola kaki baliak torai
89	Nagari	Lampung Penerang Jalan Kampung Koto dan Jirat
90	nagari	Jembatan Gantung dari surau balai ke kampung jirat
91	nagari	Pembangunan Kepala Banda sawah kampung koto dan kampung jirat
92	Nagari	Pembangunan Tali Banda kampung koto dan kampung jirat
93	Nagari	Pengecoran jalan Kampung koto dan kampung Jirat
		1.4. Urusan Wajib Sosial Budaya sbb:
1	Nagari	Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan adat istiadat
2	Nagari	Banyaknya Remaja yang belum memiliki ketrampilan baik di bidang perbengku boga.

3	Nagari	Masih ada masyarakat yang belum mengerti tentang hukum
4	Nagari	Tidak adanya Gedung MDA
5	Nagari	Masih Kurangnya anak mengaji tentang seni membaca al-quran
6	Nagari	Masih kurangnya insentif untuk guru mengaji
7	Nagari	Kurangnya pendanaan penyelenggaraan hari besar islam dan nasional
8	Jirat	Bangunan Surau Suluk Nagari (Surau Gadang) Rusak (tidak Layak Pakai)
9	Nagari	Kurangnya TPA dan TPSA di Nagari Siguntur
10	Nagari	Belum maksimalnya pembinaan pada Organisasi Bundo Kanduang
11	Nagari	Pengadaan Pelaminan selengkapnya (tenda kursi)
12	Nagari	Pelatihan adat istiadat bundo kanduang
13	Nagari	Pengadaan honor pelatih majelis taklim
14	Nagari	Pelatihan menjahit (honor Pelatih)
15	Nagari	Seperangkat alat musik untuk pemuda
16	Nagari	Belum terbinanya kesenian tradisional Nagari (Rabana Zikir, Talempung, Rani
17	Nagari	Masih kurangnya Pembekalan SDM terhadap Lembaga yang ada
18	Nagari	Kurangnya pelatihan terhadap PKK Nagari

3	Nagari	Masih ada masyarakat yang belum mengerti tentang hukum
4	Nagari	Tidak adanya Gedung MDA
5	Nagari	Masih Kurangnya anak mengaji tentang seni membaca al-quran
6	Nagari	Masih kurangnya insentif untuk guru mengaji
7	Nagari	Kurangnya pendanaan penyelenggaraan hari besar Islam dan nasional
8	Jirat	Bangunan Surau Suluk Nagari (Surau Gadang) Rusak (tidak Layak Pakai)
9	Nagari	Kurangnya TPA dan TPSA di Nagari Siguntur
10	Nagari	Belum maksimalnya pembinaan pada Organisasi Bundo Kanduang
11	Nagari	Pengadaan Pelaminan selengkapnya (tenda kursi)
12	Nagari	Pelatihan adat istiadat bundo kanduang
13	Nagari	Pengadaan honor pelatih majelis taklim
14	Nagari	Pelatihan menjahit (honor Pelatih)
15	Nagari	Seperangkat alat musik untuk pemuda
16	Nagari	Belum terbinanya kesenian tradisional Nagari (Rabana Zikir, Talempong, Rani
17	Nagari	Masih kurangnya Pembekalan SDM terhadap Lembaga yang ada
18	Nagari	Kurangnya pelatihan terhadap PKK Nagari

19	Nagari	Kurangnya keterampilan usia produktif
20	Nagari	Pengadaan Alat-Alat talempong
		1.5. Urusan Wajib Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah sbb :
1	Nagari	Masih kurangnya modal usaha kecil dan menengah bagi kaum ibu
2	Nagari	Belum adanya bangunan pasar nagari
		2. URUSAN PILIHAN
		2.1. Urusan Pilihan Pertanian sbb:
1	Nagari	Masih Kurangnya Jalan usaha Tani
2	Jirat	Jalan usaha Tani Kurao ke Batu Bagatok belum tersambung
3	Nagari	Masih kurangnya prasarana pengolahan tanah pertanian
4	Nagari	Masih adanya lahan kritis
5	Nagari	Masih kurang hasil pertanian
6	Nagari	Masih adanya lahan persawahan yang belum digarap
7	Nagari	Belum adanya alat-alat Petanian
8	Nagari	Semakin kurangnya alat Produksi Gambir (Produksi maksimal)
9	Nagari	Masih banyaknya sarana pengairan irigasi sawah yang rusak dan tidak memac

10	Nagari	Masih kurangnya alat-alat pengolah sawah (masin Bajak/Hand Traktor)
11	Nagari	Masih susah nya petani mendapatkan bibit, pupuk dan obat-obatan
12	Nagari	Tidak adanya Bantuan Tanaman Gambir
13	Nagari	Masih Kurangnya Pengairan untuk sawah
		2.2. Urusan Pilihan Peternakan dan Perikanan sbb:
1	Nagari	Belum profesionalnya pengelolaan budi daya ikan.
2	Nagari	Belum profesionalnya pengelolaan ternak sapi
3	Nagari	Pembuatan ikan air tawar larangan

3.2 MUSYAWARAH NAGARI RPJM

Dalam rangka untuk menentukan skala prioritas pembangunan baik jangka menengah maupun jangka pendek (RKP NAGARI) maka dilakukan musyawarah ditingkat Nagari sebagai berikut

- Penyusunan Draf
- Pembahasan
- Penetapan
- Per-nag

Masalah dan potensi pendukung yang ada dinagari dilakukan analisa yang mendalam oleh Tim Penyusun RPJM Nagari untuk dikelompok kan masing-masing Bidang

➤ Analisis masalah dan potensi

Masalah dan potensi pendukung yang ada didesa dilakukan analisa mendalam oleh Tim Penyusun RPJMDes untuk dikelompokan masing – masing bidang dengan cara scoring.

PENENTUAN PERINGKAT MASALAH

No	Masalah 4 Kewenangan Desa	Kriteria dan nilai pembobotan					jumlah	urutan	Ket
		Dirasakan Oleh orang banyak	Sangat Parah	MenghAmb at peningkatan pendapat	Sering Terjadi	Tersedia potensi untuk pemecahan masalah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Penyelenggar aan Pemerintah Desa								
1	Disiplin jam kerja rendah dan pelayanan masyarakat kurang	3	3	3	4	5	18	?	?
2	Minimnya kesejahteraan perangkat desa	3	5	7	4	7	26	?	?
3	Sering terjadi Kesalah pahaman	4	4	4	4	4	20	?	

	antar warga petani pada saat pembagian air irigasi								
4	Pengurus BUMNag tidak aktif	6	6	7	6	5	29		
5	Pengelolaan Bum- nag tidak berjalan	6	6	8	6	6	32		
6	Sekretariat BUMDesa tidak ada	6	6	5	6	5	28		
7	Pengurus Gapoktan tidak aktif dan program kegiatannya tidak berjalan	6	6	5	5	5	27		
8	Pendidikan masih Rendah	6	6	6	7	5	29		
9	Konflik antar keluarga	4	4	5	4	4	21		
10	Konflik antar petani pemakai air	4	4	4	4	4	20		
11	Pengelolaan galian C tidak teratur	4	4	4	7	7	26		
12	Fasilitas kantor desa belum memadai	5	5	5	5	5	25		
13	Angka pernikahan dini masih tinggi	4	4	4	5	5	22		

14	Belum optimalnya fungsi BPD	5	5	5	5	7	27		
II	Pembangunan Desa								
1	Pembuatan Jamban	8	5	4	2		19		
2	Tidak adanya palnk pengumuman larangan MCK	5	5	7	5		22		
3	Jalan didepan kantor Wali Nagari SMP Rusak	6	6	6	5	7	30		
4	Jalan ke sawah liek dalam keadaan rusak	7	6	4	3		20		
5	Belum tersedianya plat nomor rumah penduduk	6	6	6	9		31		
6	Pembenahan gedung kantor wali	9	7	7	9		32		
7	Tidak tersedianya rambu-rambu	7	5	5	7		24		

	jalan masuk koto SDN 14								
8	Belum adanya sarana penghubung SD 14 dengan Mushalla Babussalam	5	5	5	5		20		
9	Belum memadai Sarana Jalan usaha Tani	8	9	9	6		32		
10	Jalan Pemukiman Kurao Indah rusak	8	5	5	9		27		
11	Belum adanya drainase Kantor KAN	5	5	5	5		20		
12	Belum teralimnya listrik ke lapangan bola kaki baliak torai	6	6	6	7		25		
13	Belum adanya pagar pembatas pandangan di Lubuak bonai	8	7	7	5		27		
14	Parit Miring kantor Wali Nagari sudah rusak	7	5	4	2		18		
15	Belum tersedianya sarana air bersih	5	2	3	3		12		

	ke tanah melayu								
16	Belum memadai sarana irigasi	2	2	2	2		8		
17	Dipinggir sungai banyak tebing yang runtuh	6	6	6	6		24		
18	Sarana air bersih sudah rusak	2	1	1	1		5		
19	Belum tersedianya drainase dimasing-masing kampung	5	2	3	3		13		
20	Jalan ke koto sawah liek belum tersambung	6	5	6	5		22		
21	Belum adanya kantor KAN Siguntur	9	9	7	7		32		
22	Belum ada gerbang pembatas Nagari	2	2	3	4		11		
23	Penerangan lampu jalan Nagari	8	8	7	9		32		

24	Perkunya rehab jalan sabalik koto	9	9	7	8		33		
25	Belum adanya gedung SMA/SMK								
26	Belum sempurnanya sarana olahraga								
II	Pembinaan								
I	Kemasyaratan								
1	Banyak masyarakat terjangkit penyakit yang tergolong 10 Variabel penyakit umum	6	7	5	5		23		
2	Musim Tanam Padi Tidak Teratur	4	5	5	4		18		
3	Musim Tanam Padi Tidak Teratur	4	5	5	4		18		
4	Musim Tanam Palawija dan Holtikultura Tidak Teratur	4	4	4	4		16		
5		5	5	3	6		19		
6	Pada musim hujan jumlah masyarakat	4	5	6	4		18		

	Masih banyak putus sekolah								
11	Keterampilan masyarakat kurang	5	4	1	2		11		
12									

- Analisis tindakan yang tepat terhadap masalah

Dari hasil scoring diurutkan berdasarkan sort penilaian dan nilai yang paling tinggi ditetapkan sebagai peringkat yang paling tinggi.

PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN

(SKOR 1 – 5)

Tindakan yang layak 4 Kewenangan Desa	Bobot max	Pmnuhan kbutuhan org bnyk	Dukungan pnngktn Pndptn masy	Dukungan ptensi	jumlah nilai	Prngkt Tindkn (B-F)
I. Penyelenggaraan Pemerintah Desa						

Revisi Pengurus BUMDes	16	5	5	4	14	
Pengadaan Sekretariat BUMDesa	16	5	5	5	15	
Pengaturan jadwal yang jelas bagi petani pengguna air	16	5	5	5	15	
Pengadaan fasilitas kantor desa	16	5	5	5	15	
Peningkatan kesejahteraan aparat desa	16	4	4	4	12	
Revisi kepengurusan Gapoktan	16	4	3	4	11	
Peningkatan kesejahteraan BPD	16	4	3	4	11	
Penataan Siskamling	16	3	3	4	10	
Penerbitan perdes pengelolaan galian C	16	4	3	3	10	
Peningkatan kapasitas Aparat Desa	16	4	4	3	11	
Pendataan warga yang putus Sekolah	16	3	2	3	8	
Penegakan batas usia perkawinan	16	3	2	2	7	
Pemb TPQ/TPA	16	2	2	2	6	
Pembangunan	16	2	2	2	6	

Pengadaan Sertifikat Tanah	16	4	4	4	12	
Pembangunan gedung kantor Wali NAGARI	16	2	2	2	6	
Pembebasan Lahan Pembangunan Nagari		3	3	3	6	
II. Pembangunan Desa						
Gedung SDN 29 Rusak	16	5	5	5	15	
Tidak adanya taman bacaan	16	5	5	5	15	
Masih kurangnya sarana belajar	16	5	5	5	15	
Kurangnya bantuan untuk pelajar dan mahasiswa berprestasi	16	4	5	5	14	
Masih tingginya angka anak putus sekolah dan pengangguran	16	5	5	4	14	
Kurangnya fasilitas sekolah SDN 14	16	4	5	4	13	
SDN 43 tidak punya air bersih	16	4	4	5	13	
Pengadaan alat-alat dan pelatihan perbengkelan otomotif	16	5	4	4	13	
Perbaikan pagar SD 29	16	4	4	4	12	

Bantuan alat kesenian	16	3	4	3	10	
Pelatihan perbengkelan, tata rias, tata boga	16	4	3	3	10	
Lisensi pelatih SSB Siguntur	16	3	3	3	9	
Masih kurangnya jalan usaha tani	16	3	3	3	9	
Jalan usaha tani kurao ke batu gatok belum tersambung	16	3	3	3	9	
Masih kurangnya prasarana pengolahan tanah pertanian	16	3	3	3	9	
Masih adanya lahan kritis	16	2	3	3	8	
Masih adanya persawahan yang belum digarap	16	3	2	1	7	
Belum adanya alat-alat pertanian	16	4	4	5	13	
Semakin kurangnya alat produksi gambir	16	2	2	2	6	
Masih banyaknya sarana pengairan irigasi yang rusak	16	2	2	2	6	
Masih kurangnya alat-alat pengolahan sawah	16	5	4	5	14	

Tidak adanya bibit gambir	16	4	5	4	13	
Hand traktor/perorok gabein						
III. Pembinaan Kemasyarakatan						
Penyuluhan anti Narkoba	16	5	5	5	15	
Pembentukan Lembaga sosialnya dan Keagamaan	16	5	5	5	15	
Sarana posyandu	16	5	5	5	15	
Penyuluhan pola asuh bagi bumil & buhil	16	5	5	5	15	
Penyuluhan dan pembinaan anak dan remaja	16	5	4	5	14	
Pemberian insentif Kader Posyandu	16	4	4	5	13	
Pembentukan TPQ dan LPTQ	16	3	4	4	11	
MTQ Tingkat Desa	16	3	3	4	10	
Pembangunan lapangan Bola dan sarana pendukung	16	3	3	3	9	
Pembinaan Kelompok Kesenian	16	3	2	3	8	

Daerah							
Pembuatan Pos Jaga (Poskamling)	16	3	2	2	8		
PHBN		3	3	3	9		
PHBI		4	3	4	11		
Pembinaan KAN		5	4	5	14		
Pembinaan PKK		4	4	5	13		
Pembinaan PEMUDA		4	4	4	12		
IV. Pemberdayaan Masyarakat							
Pelatihan BUMNag	16	4	4	5	13		
Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat	16	5	5	5	15		
Bidang Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan keluarga	16	5	4	4	13		
Pelatihan Penyuluhan perempuan		4	4	5	13		
Pemberdayaan kader KPMD	16	4	4	5	13		
Pemberdayaan Kader PIKR	16	4	5	4	13		

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan nagari. Penyusunan Visi Nagari Siguntur ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Nagari Siguntur seperti pemerintah Nagari, Bamus Nagari, KAN, Niniak Mamak, Cadiak Pandai, Alim Ulama, Bundo Kanduang, LPMN dan Tokoh Masyarakat lainnya pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di nagari seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Nagari Siguntur adalah :

Berdasarkan masalah dan potensi dan harapan masa depan maka pemerintah Nagari Siguntur dalam periode 2015 – 2021 menetapkan visi sebagai berikut :

**“ MEWUJUDKAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
PEMBANGUNAN DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN YANG BAIK MENUJU
TERWUJUDNYA MASYARAKAT SIGUNTUR YANG DAMAL, AMAN DAN
SEJAHTERA “**

Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur yang diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tidak saja memiliki *dimensi fisik atau materi*, tetapi juga *dimensi rohani*. Dengan demikian Visi tersebut memiliki makna bahwa *pembangunan yang dilakukan ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat*. Kesejahteraan dicapai dengan berpegang pada prinsip keseimbangan (lahir dan bathin, moril dan materil, dunia dan akhirat, dan sebagainya).

Kesejahteraan ditunjukkan dengan perolehan tingkat kehidupan yang layak dipandang dari kelayakan ekonomi dan berkeseimbangan baik dilihat sisi

agama maupun sosial budaya. Selain itu adanya rasa aman, nyaman dan tentram merupakan tolok ukur

penambahan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Perwujudan visi tersebut dilaksanakan melalui Pembangunan Ekonomi, Agama dan Sosial Budaya, secara menyeluruh (*holistik*), dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.1.2. Misi

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Nagari agar tercapainya visi nagari tersebut. Visi berada di atas Misi yang mana pernyataan dari Visi akan dijabarkan ke dalam misi dan dapat

di operasionalkan / dikerjakan sehingga nagari berjalan dengan tujuan alur perencanaan yang telah dituangkan dalam visi tersebut. Sebagaimana penyusunan Visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dengan mempertimbangan potensi dan kebutuhan Nagari Siguntur, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Nagari Siguntur adalah :

1. Menjalankan konsep-konsep Pemerintahan yang baik dengan mengoptimalkan peran fungsi lembaga dan unsur yang ada di nagari.
2. Mengembangkan dan meningkatkan perekonomian lokal dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dan ketersediaan sarana pendukung.
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan meningkatkan akses terhadap pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Agama dan Kebudayaan.
4. Mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana nagari, ekonomi, agama dan sosial budaya.

Moto

"Dengan Kebersamaan Kita Bisa"

Berdasarkan Visi dan Misi diatas, maka Arah kebijakan pembangunan Nagari Siguntur Tahun 2015 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Menjalankan konsep-konsep Kepemerintahan yang baik dengan mengoptimalkan peran fungsi lembaga dan unsur yang ada di nagari, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan peran serta Pemerintahan Nagari, KAN, LPMN dan PKK dalam memberikan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat nagari Siguntur.
 - b. Mengoptimalkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kelembagaan di Nagari Siguntur.
2. Mengembangkan dan meningkatkan perekonomian lokal dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dan ketersediaan sarana pendukung, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Memberdayakan dan menumbuhkan peran serta masyarakat dalam mengelola dan optimalisasi sumber daya alam di kenagarian Siguntur
 - b. Memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan sarana utama dan pendukung dalam mengembangkan komoditi unggulan di Nagari Siguntur.
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan meningkatkan akses terhadap pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Agama dan Kebudayaan, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan pola sikap serta aktivitas dalam kehidupan masyarakat.
 - b. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan lembaga pendidikan dan kesehatan.
 - c. Pemberdayaan sosial budaya secara berkepribadian, dinamis kreatif dan berdaya-tahan.
4. Mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana nagari, ekonomi, agama dan sosial budaya, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Mewujudkan ketersediaan Sarana dan Prasarana di Nagari Siguntur yang memadai, sebagai penyokong dalam keberlangsungan, kenyamanan dan kehidupan bermasyarakat.

Pembangunan pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dan masyarakat, dalam alam demokrasi diharapkan peranan masyarakat lebih dominan dalam pelaksanaan pembangunan Nagari. Sebagai upaya menuju sasaran tersebut maka salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat

lebih terprogram dan terarah, disisi lain untuk meningkatkan kemampuan masyarakat perlu kemitraan dengan pihak lain. Kemitraan tidak hanya memperkuat dalam hal pendanaan, tetapi dalam kemitraan akan terjadi transfer pengetahuan, teknologi dan manajemen yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas usaha.

Mengembangkan perekonomian Nagari merupakan salah satu masalah yang mendasar yang dihadapi dalam pembangunan Nagari. Sebagai dampak krisis ekonomi adalah besarnya tingkat pengangguran yang bermuara dengan makin meningkatnya jumlah penduduk miskin. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan mendasar tersebut adalah menggerakkan sektor perekonomian Nagari dengan memperluas akses masyarakat Nagari ke sumber-sumber daya produktif untuk mengembangkan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan pasar.

Dari uraian tersebut diatas, maka pencapaian misi Wali Nagari dapat diindikasikan sebagai berikut :

- a. Keimanan dan ketaqwaan sebagai pegangan hidup
- b. Penataan administrasi pemerintahan Nagari
- c. Pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat Nagari
- d. Peningkatkan sumber daya manusia sesuai kemajuan zaman
- e. Pengelolaan sumber daya nagari sebagai faktor yang mendukung pembangunan
- f. Pelestarian azaz gotong royong masyarakat
- g. Koordinasi pemerintahan Nagari dan kelembagaan Nagari
- h. Tanggungjawab tugas pemerintahan Nagari kepada pemerintah yang diatasnya
- i. Saling memahami antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan Nagari
- j. Terselenggaranya tugas –tugas pemerintah Nagari secara efektif
- k. Tersusunnya program-program pembangunan Nagari secara efektif dan efisien
- l. Pengalokasian anggaran yang efektif berdasarkan skala prioritas
- m. Terlaksananya pengawasan melekat yang efektif

- n. Meningkatnya jumlah dan keragaman sumber-sumber pendanaan Nagari meningkatnya kemandirian masyarakat, terutama dalam bidang pendanaan pembangunan
- o. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
- p. Meningkatnya kemampuan masyarakat mengakses ke sumber sumber daya termasuk informasi
- q. Meningkatnya usaha kemitraan yang dilakukan oleh masyarakat
- r. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
- s. Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat
- t. Berkembangnya produktifitas sektor pertanian dan sektor sektor riil ekonomi Nagari.

4-3 Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan Nagari merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Wali nagari terpilih sebagai arah bagi aparat pemerintah Nagari, guna mencapai kinerja sesuai tugas dan fungsinya. Arah kebijakan nagari, umumnya akan memuat arahan-arahan yang berorientasi pada :

1. Peningkatan produktifitas sector riil ekonomi nagari
2. Peningkatan kelembagaan pemerintahan nagari
3. Peningkatan peran lembaga-lembaga kemasyarakatan nagari sebagai mitra pemerintahan nagari.
4. Peningkatan kualitas prasarana terhadap umum/kenyamanan.
5. Peningkatan infrastruktur ekonomi nagari
6. Peningkatan peran serta masyarakat
7. Peningkatan iman,taqwa dan moral
8. Peningkatan perlindungan anak terlantar, penyandang masalah sosial, ekonomi dan sejenisnya
9. Peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat
10. Peningkatan aktivitas dan kreativitas pemuda
11. Peningkatan keamanan dan ketertiban /ketentraman dan kewaspadaan terhadap bencana
12. Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi
13. Peningkatan budaya/gerakan efisien,efektifitas,disiplin, berprestasi
14. Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi

15. Peningkatan budaya/gerakan fisien, efektifitas, disiplin, berprestasi.
16. Peningkatan kualitas lingkungan
17. Peningkatan kesempatan kerja/lapangan kerja
18. Kecukupan energi dan air bersih
19. Peningkatan peran kaum Perempuan
20. Penguasaan informasi teknologi

Secara rinci arah kebijaksanaan umum beberapa sektor penting adalah sebagai berikut :

1. Pertanian

Arah kebijakan umum pembangunan pertanian adalah kecukupan pangan, penganekaragaman komoditas, fasilitas pemberdayaan petani miskin dan peningkatan pendapatan petani.

2. Pendidikan

Arah kebijakan umum pembangunan pendidikan adalah peningkatan melek huruf, khususnya wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan.

3. Kesehatan

Arah kebijakan umum pembangunan kesehatan adalah penurunan angka kematian kasar (bayi dan ibu hamil), peningkatan gizi anak, peningkatan kesehatan lingkungan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama keluarga miskin.

4. Perekonomian Desa

Arah kebijakan umum perekonomian nagari adalah peningkatan lapangan kerja, penganekaragaman usaha ekonomi dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pemanfaatan potensi ekonomi nagari yang berkelanjutan.

5. Lingkungan hidup

Arah kebijakan umum pengembangan lingkungan hidup adalah peningkatan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup ditingkat nagari.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Siguntur Periode 2015 – 2021

6. Pemerintahan Nagari

Arah kebijakan umum kegiatan pemerintahan Nagari adalah penataan kelembagaan pemerintah nagari, peningkatan kinerja aparatur pemerintah nagari, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan nagari, penguatan dalam pendanaan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

7. Sosial Budaya

Arah kebijakan umum di bidang sosial budaya adalah sebagai berikut :

- a. Terbentuknya masyarakat yang inovatif, kreatif dan informatif
- b. Terbentuknya masyarakat yang tentram , tertib ,disiplin , beretos kerja tinggi ,agamis dan bermoral
- c. Peningkatan peran wanita dalam pelaksanaan pembangunan nagari
- d. Terbentuknya masyarakat yang bebas dari gangguan alam dan penyakit social
- e. Pemeliharaan adat istiadat dan seni budaya asli daerah

8. Agama

Arah kebijakan umum dan kehidupan beragama, bermasyarakat, mencerminkan kerukunan hidup beragama.

9. Keuangan Nagari

Keuangan nagari adalah semua hak dan kewajiban nagariyang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik nagari sehubungan dengan pelayanan hak dan kewajiban nagari.

Implementasi keuangan nagari setiap tahun dituangkan dalam peraturan nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari).APB Nagari merupakan alat akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan nagari.

4.2. Kebijakan Pembangunan

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nagari

Menyikapi Misi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan di atas, maka dapat dijabarkan ke dalam program pembangunan nagari, dimana kedepannya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Siguntur Periode 2015 – 2021

program-program ini akan menjadi pedoman nagari dalam merencanakan rencana kegiatan tahunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepannya.

Adapun Program pembangunan di uraikan berdasarkan misi nagari dapat dinarasikan sebagai berikut :

1. **Menjalankan konsep-konsep Kepemerintahan yang baik dengan mengoptimalkan peran fungsi lembaga dan unsur yang ada di nagari, dengan program sebagai berikut :**
 - a. Program Peningkatan Informasi dan Basis Data tentang Nagari
 - b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kompetensi Kelembagaan di Nagari
 - c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik

2. **Mengembangkan dan meningkatkan perekonomian lokal dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dan ketersediaan sarana pendukung, dengan program sebagai berikut :**
 - a. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian
 - b. Program Pengelolaan Sumber Daya Pertanian
 - c. Program Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - d. Program Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Peternakan dan Perikanan

3. **Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan meningkatkan akses terhadap pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Agama dan Kebudayaan, dengan program sebagai berikut :**
 - a. Program Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - b. Program Bantuan Layanan Kesehatan kepada Masyarakat
 - c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
 - d. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama
 - e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pendidikan agama
 - f. Program Peningkatan pendanaan untuk kehidupan beragama
 - g. Program pengembangan Lifeskill untuk masyarakat nagari
 - h. Program Peningkatan kesadaran penegakan hukum dan adat istiadat
 - i. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.

4. **Mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana nagari, ekonomi, agama dan sosial budaya**, dengan Program sebagai berikut :
 - a. Program Peningkatan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Praarana Jalan dan Jembatan
 - b. Program Pengembangan Fasilitas Pengatur Lalu Lintas
 - c. Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana air Bersih
 - d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik
 - e. Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Kebersihan
 - f. Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana irigasi
 - g. Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana Drainase dan Pengamanan Tebing.
 - h. Program Pembangunan Pasar Nagari

4.2.4. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian merupakan langkah – langkah yang berisikan kegiatan - kegiatan indikatif yang bersifat aplikatif dan akan diterapkan sebagai bentuk capaian dalam mewujudkan Visi dan Misi. Dalam hal ini Strategi Pencapaian merupakan jabaran daripada Program pembangunan, yang berisi kumpulan – kumpulan kegiatan yang mana dasar penetapan kegiatan tersebut mempertimbangan permasalahan dan potensi yang mengemuka di Nagari Siguntur

Adapun Stategi Pencapaian untuk Kenagarian Siguntur dapat dijabarkan berdasarkan Program – Program Pembangunan yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

- *Nan dakek dicaliak, Nan jauh dijalang*
 - Menjalin koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan elemen masyarakat nagari maupun yang ada dirantau untuk menyampaikan dinamika penyelenggaraan pemerintahan diwilayah nagari siguntur.
- *Duduak surang Basampik basampik, Duduak basamo balapang-lapang*

- * Mengedepankan asas musyawarah dan mufakat dalam menghadapi dan mengintegrasikan berbagai permasalahan yang ada.
- * *Satu sakti untuk bersama*
- * Merangkul dan mengajak peran serta setiap lapisan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk bahu membahu dalam melaksanakan program pemerintah serta turut memberikan Kontribusi atas segala kegiatan vital yang berkembang ditengah tengah masyarakat.
- * *Ingek Nabulan sakti kanai, Pinteh sabatui anyuk*
- * Mengutamakan pendekatan preventif secara persuasif dalam menghadapi potensi masalah yang mungkin timbul dalam lingkungan internal maupun ditengah-tengah masyarakat.

- a. Program Peningkatan Informasi dan Basis Data tentang Nagari, dengan strategi Penyiapan dan Tersedianya data Profil Nagari yang berbasis aplikasi.
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kompetensi Kelembagaan di Nagari
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik
- d. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian
- e. Program Pengelolaan Sumber Daya Pertanian
- f. Program Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- g. Program Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Peternakan dan Perikanan
- h. Program Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
- i. Program Bantuan Layanan Kesehatan kepada Masyarakat
- j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
- k. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama
- l. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pendidikan agama
- m. Program Peningkatan pendanaan untuk kehidupan beragama
- n. Program pengembangan Lifeskill untuk masyarakat nagari
- o. Program Peningkatan kesadaran penegakan hukum dan adat istiadat
- p. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.

- q. Program Peningkatan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan
- r. Program Pengembangan Fasilitas Pengatur Lalu Lintas
- s. Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana air Bersih
- t. Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik
- u. Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Kebersihan
- v. Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana irigasi
- w. Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana Drainase dan Pengamanan Tebing.
- x. Program Pembangunan Pasar Nagari

4.2.2. Potensi dan Masalah

Mengacu pada potensi dan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka jika dihubungkan dengan kebijakan pembangunan paling tidak ada **3 isu strategis** yang harus di perhatikan agar kebijakan pembangunan tersebut tidak salah arah. 3 hal penting yang dimaksud adalah :

- a. Kebijakan pembangunan harus mengarah pada pembangunan Infrastruktur jalur transportasi, karena disana ada potensi lahan-lahan perkebunan akan tetapi masalahnya adalah tidak layaknya jalur transportasi sehingga hasil tani masyarakat tidak dapat menghasilkan Pendapatan yang Maksimal.
- b. Kebijakan pembangunan harus mengarah pada pembangunan manusianya atau peningkatan kapasitas karena disana banyak masyarakat yang memiliki talenta-talenta yang tidak tersalurkan sekaligus merupakan potensi yang ada pada diri masyarakat, akan tetapi masalahnya adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap bakat-bakat yang ada pada masyarakat tadi, akan tetapi belum memiliki keterampilan yang professional sehingga membutuhkan tambahan-tambahan ilmu dan pengalaman
- c. Kebijakan pembangunan harus mengarah meningkatkan kesejahteraan lewat bantuan dana-dana simpan pinjam perempuan atau dana usaha ekonomi produktif, karena di sana ada potensi dimana banyak masyarakat mempunyai usaha baik dalam skala kecil maupun skala besar akan tetapi masalahnya adalah kurangnya modal usaha.

BAB V

PENUTUP

Program pembangunan nagari pada dasarnya merupakan instrument untuk mewujudkan visi dan misi Wali Nagari. Program kerja disusun berdasarkan visi dan misi Wali Nagari serta indikator pencapaian visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya dengan memperhitungkan gambaran umum, kondisi nagari, strategi pembangunan nagari, arah kebijakan keuangan nagari dan arah kebijakan umum yang telah ditetapkan.

Karena program ini hanya untuk jangka 6 (enam) tahun maka untuk menjebatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa jabatan wali nagari, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekedar dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa transisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM Nagari Tahun tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun mengikuti jabatan Wali Nagari silih berganti. Demikian program-program yang kami rencanakan semoga Allah SWT memberikan Ridhos ehingga semua program bisa terealisisesuai yang disusun dan direncanakan.

"Terbangunnya tata kelola pemerintahan Nagari yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera"

3.1.6 HASIL PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

SUB NAGARI SIGUNTUR

No	Lokasi	Masalah	Penyebab	Potensi
1	2	3	4	5
		1. Urusan Wajib		
		1.1. Urusan wajib pendidikan sbb:		
1	Jirat	Gedung SD 29 sudah rusak	Bangunan Sudah Tua	Tenaga dan Matrial
2	Siguntur	Tidak adanya Taman Bacaan (Pustaka) di Nagari	Terbatasnya Dana	Tenaga Matrial dan Lokasi
3	Siguntur	Masih kurangnya Ruang Belajar dan sarana prasarana PBM di SMPN 5- SD 14,SD 43, dan TK/PAUD	Terbatasnya dana	Siswa
4	Siguntur	Belum adanya bantuan untuk anak berprestasi	Terbatasnya dana	Siswa
5	Siguntur	Masih tingginya angka anak putus sekolah dan pengangguran	Angka kemiskinan tinggi	Pengentasan kemiskinan
6	Jirat	Kurangnya Fasilitas Sekolah SD No 14	Fasilitas Sekolah SD No. 14	Tenaga/Material
7	Jirat	Jembatan Menuju SD No. 29 rusak	Jembatan Menuju SD No. 29 Rusak	Siswa ada
8	Koto	SD 43 Tidak punya air bersih	SD 43 tidak Punya air bersih	Siswa ada
9	Siguntur	Pengadaan alat-alat dan pelatihan perbengkelan otomotif dan las	Banyaknya pengangguran	Tenaga ada
	1.2.	1.3. Urusan wajib Kesehatan sbb:		

1	Siguntur	Tidak adanya gedung Puskesmas di Kampung Koto dan Kampung Jirat	Belum tersedia sarana prasarana dan tenaga	Tenaga ada
2	Siguntur	Tiap tahun banyak anak-anak RTM/Yasin yang akan meninggal	Curang Taw Kurang tenaga	Tenaga ada
3	Siguntur	JAMKESMAS/JAMKESDA	Masih tinggi masyarakat miskin	Rendah Tenaga Miskin Ada
4	Siguntur	Masih adanya RTM, tinggal di rumah tidak layak huni	Masih tingginya masyarakat miskin	Rendah Tenaga Miskin Ada
5	Siguntur	Rehab bangunan Pustu	Bangunan sudah tua	Masyarakat ada
6	Siguntur	Pembuatan pagar pustu dan penanaman pohon lindung	Belum adanya pohon lindung dan pagar	Untuk K.
7	Siguntur	Pemberian makanan tambahan untuk balita dan hamil di Posyandu	Masih kurangnya makan tambahan balita dan ibu hamil	Pengawasan Komunitas
8	Siguntur	Penambahan sarana alat-alat kesehatan	Masih Kurang sarana alat kesehatan	Untuk kelancaran pengobatan
9	Siguntur	Penambahan sarana alat-alat kesehatan seperti meja dan kursi untuk pos yandu, tempat tidur posyandu, PARTUS SET (minimal 2x setahun)	Masih Kurang sarana alat kesehatan	Untuk kelancaran pengobatan
10	Siguntur	Pembangunan Gedung Puskesmas	Masih Kurang sarana alat kesehatan	Keluasan Pelayanan
1.4.		1.5. Urusan Wajib Sarana Prasarana sbb:		
1	Koto	Pagar Pengaman di Kampung Tanjung belum di Plaster	Belum di plaster pagar	Tenaga ada, Material ada
2	Siguntur	Tidak adanya Plang Pengumuman Larangan MCK	Belum ada larangan MCK	Tenaga dan Material
3	Jirat	Jalan di Depan Kantor Wali Nagari ke SMP rusak	Belum permanennya jalan	Tenaga dan material
4	Jirat	Jalan ke sawah lirk dalam keadaan rusak	Belum permanennya jalan	Tenaga dan material

5	Siguntur	Belum Tersedianya Plat Nomor Rumah Penduduk	Belum Tersedianya Plat Nomor Rumah Penduduk	Kawasan Penduduk
6	Jirat	Kantor Wali dalam keadaan rusak	Bangunan sudah tua	Tenaga, Material
7	Jirat	Tidak tersedianya rambu-rambu jalan masuk koto, SD 14, SMP dan TK	Belum adanya rambu jalan, masuk koto, SD 14, SMP dan TK	Tenaga
8	Jirat	belum adanya sarana penghubung SD 14 dengan Mushalla Babussalam	Belum adanya sarana penghubung SD 14 dengan Mushalla Babussalam	Tenaga
9	Jirat	Belum memadai sarana jalan usaha tani	Belum memadai sarana jalan usaha tani	Produksi tani, tenaga
10	Jirat	Jalan pemukiman kurao indah rusak	Jalan sudah rusak	Tenaga, material
11	Koto	Pembenahan Lapangan Bola Kaki Baliak Torai	Lapangan belum datar	Tenaga, material, lokasi
12	Koto	Belum teralirnya listrik ke lapangan bola kaki baliak torai	Belum teralirnya listrik ke baliak torai	Rumah Penduduk
13	Koto	Belum adanya Pagar Pembatas Pandangan di Lubuak Bonai	Belum adanya Pagar Pembatas Pandangan di Lubuak Bonai	Tenaga dan Matrial
14	Jirat	Parit miring Kantor Wali Nagari sudah rusak	Terkena Gempa tahun 2009	Tenaga dan Matrial
15	Jirat	Belum tersedianya sarana air bersih ke tanah melayu	Belum tersedianya sarana air bersih ke tanah melayu	Air, Material dan Tenaga
16	Siguntur	Belum memadai sarana irigasi	Belum memadai sarana irigasi	Produksi padi, dan Tenaga
17	Siguntur	Di Pinggir Sungai Banyak terbing yang runtuh	Karena gerusan air	Matrial dan Tenaga
18	Siguntur	Sarana air bersih sudah rusak	Bangunan sudah tua	Tenaga, Sarana ada
19	Siguntur	Belum tersedinya Drainase di masing-masing Kampung	Belum tersedianya Drainase di masing-masing Kampung	Tenaga dan Matrial

20	Jeni	Jalan Koto ke Sawah Liek belum tersambung	Jalan Koto ke Sawah Liek belum tersambung	Tenaga dan Material
21	Siguntur	Belum sempurnanya saluran air bersih	Belum sempurnanya saluran air bersih	Masyarakat
22	Siguntur	Belum ada gerbang pembatas Nagari	Belum ada gerbang batas Nagari	Lahan ada
23	Siguntur	Penerangan Lampu jalan Nagari	Penerangan Lampu jalan Nagari	Jalan ada
24	Koto	Perbunya rebah jalan satuiki Koto (Permanen)	Jalan sudah rusak	Jalan ada
25	Siguntur	Belum adanya gedung SMA/SMK	Belum adanya gedung SMA/SMK	Siswa ada
26	Koto	Belum sempurnanya sarana olah raga (lapangan Bola Kaki, dll)	Segera dibangun	Lapangan ada
27	Koto	Jembatan Baliak Torai ke Patai	Jalan ada, Masyarakat ada	Lahan ada
28	Siguntur	Belum adanya profil nagari		Tersedianya data primer
29	Siguntur	Renovasi Bangunan Pos Keamanan yang Kurang Layak Pakai	Bangunan Sudah Tua	Pos Keamanan ada
30	Siguntur	Belum adanya Bangunan Kantor Bamus Nagari	Belum adanya Bangunan Kantor Bamus Nagari	Lahan Material dan Tenaga ada
31	Siguntur	Masih kurangnya insentif untuk Pegawai Pemerintahan Nagari/BAMUS/LPMN dll	Masih kurangnya insentif untuk Pegawai Pemerintahan Nagari/BAMUS/LPMN dll	Pegawai ada
32	Siguntur	Honor kader mohon dinaikan	Honor kader mohon dinaikan	Kader ada
33	Jirat	Terganggunya Akses Jalan Perkebunan Masyarakat kekura	Terganggunya Akses Jalan Perkebunan Masyarakat kekura	Jalan keperkebunan masyarakat
34	Siguntur	Banyaknya lahan pertanian yang tidak tergarap akibat kekurangan pengairan sawah lasuang	Irigasi tidak memadai	Lahan pertanian ada

35	Siguntur	Lahan pertanian sawah rumah gadang terancam tidak tergarap	Irigasi tidak memadai	Lahan pertanian ada
36	Siguntur	Pemeliharaan Aset Nagari	Pemeliharaan Aset Nagari	Aset ada
37	Jirat	Kurang Lancar pengairan sawah jalan kalawik	Irigasi tidak memadai	Lahan pertanian ada
38	Siguntur	Jembatan Gantung Penghubung Kampung jirat dan Kampung Koto	Belum adanya jembatan Gantung	Tenaga, Hasil Pertanian
39	Jirat	Pengairan sawah kelok tidak Produktif	Irigasi tidak memadai	Lahan pertanian ada
40	Jirat	Tebing sawah galanggang kasiak runtuh karena gerusan air sungai	Sering tebing runtuh	
41	Koto	Kurang lancar Pengairan sawah air kaciak	Irigasi tidak memadai	Lahan pertanian ada
42	Siguntur	Terancamnya pemukiman warga karena banjir air sungai	Penyempitan air sungai	Pemukiman penduduk padat
43	Koto	Tali Banda sawah patai tidak berfungsi	Irigasi tidak memadai	Lahan pertanian ada
44	Koto	Pengairan sawah lua tidak lancar	Irigasi tidak memadai	Lahan pertanian ada
45	Siguntur	Sering terjadinya kebakaran	Rumah penduduk padat	Pemukiman penduduk
46	Koto	Lapangan bola kaki tidak memenuhi standar	Penambahan lapangan bola kaki	Lahan ada
47	Siguntur	Sering terjadinya banjir	Penyempitan air sungai	Pemukiman penduduk
48	Siguntur	Peralatan Pengolahan Usaha Gambir	Kurangnya alat pengolahan gambir	Lahan Gambir ada
49	Siguntur	Pembinaan Seni Rabana Zikir dan Rasanji	Kurangnya kesenian tradisional	Kelompok ada
50	Koto	Tali Banda Sawah Mudiak Rusak	Sering terjadinya tebing runtuh	Lahan ada

51	Koto	Batu Baronjong / Dam Kampung Tanjung akibat Gerusan air Batang Siguntur	Sering terjadinya tebing runtuh	Pemukiman ada
52	Koto	Drainase Kampung Bukik	Kurang lancarnya saluran pembuangan air	Meningkat perekonomian masyarakat
53	Koto	Penambahan Jaringan air bersih subarang	Banyak masyarakat belum menikmati air bersih	Meningkat perekonomian masyarakat
54	Koto	Drainase Kampung Balai	Kurang lancarnya saluran pembuangan air	Meningkat perekonomian masyarakat
55	Jirat	Banyak tebing yang runtuh di sungai batang tarusan	Sering terjadinya tebing runtuh	Pemukiman Penduduk Lahan pertanian
56	Siguntur	Sarana air bersih sungai sariak dalam keadaan rusak	Bak Intek sudah tua	Pemukiman penduduk
57	Jirat	Intek sarana air bersih Kurao dalam keadaan rusak	Kurang lancarnya air kepada masyarakat	Pemukiman penduduk
58	Jirat	Jalan Setapak kesungai sariak	Pembuatan jalan	Lahan ada
59	Koto	Kurangnya mobiler SD 43	Kurangnya mobiler SD 43	Siswa ada
60	Koto	Belum Adanya Pustaka Dan Aula SD 43	Pustaka dan aula SD 43	Siswa ada
61	Siguntur	Mobiler Kantor BAMUS dan Ruangan Kantor Wali nagari	Kurangnya mobiler BAMUS dan ruangan Kantor Wali Nagari	Peningkatan Pelayanan Masyarakat
62	Jirat	Jl. Setapak Tanah melayu	Jalan Setapak Tanah melayu	Meningkat perekonomian masyarakat
63	Jirat	Parit Miring Belakang Kantor Wali Nagari	Parit Miring Kantor Wali Nagari	Peningkatan Pelayanan Masyarakat
64	Jirat	Tebing sungai sariak banyak yang runtuh	Gerusan Air Sungai	Tenaga, Material

65	Siguntur	Pembangunan Jembatan Kampung Koto dan Jirat	Kurangnya penghubung jalan	Meningkat perekonomian masyarakat
66	Siguntur	Pengecoran Jalan Kampung Koto dan Kampung Jirat	Banyak Jalan yang rusak	Kelancaran Transportasi
67	Siguntur	Pembenahan Drainase kampung koto dan kampung jirat	Banyaknya saluran drainase yg tidak lancar	Kalancaran saluran pembuangan warga
68	Siguntur	Pembuatan jalan Lingkar dari jembatan palimauan ke bungo tanjung	Mempermudah jalur akses ekonomi warga	Meningkat perekonomian masyarakat
	1.6.	1.7. Urusan Wajib Lingkungan Hidup sbb:		
1	Siguntur	Belum tersedianya tempat penampungang sampah	Belum tersedianya tempat penampungan sampah	Tenaga, Material
2	Siguntur	Masih perlunya rehabilitasi lingkungan daerah kumuh	Masih perlunya rehabilitasi lingkungan daerah kumuh	Masyarakat ada/rumah ada
3	Siguntur	Padatnya Pemukiman Warga	Padatnya Pemukiman Warga	Pemukiman Penduduk ada
4	Siguntur	Daerah rawan kebakaran	Padatnya Pemukiman Penduduk	Pemukiman Penduduk ada
	1.8.	1.9. Urusan Wajib Sosial Budaya sbb:		
1	Siguntur	Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan adat istiadat	Kurangnya pelatihan dan buku-buku adat	Masyarakat
2	Siguntur	Banyaknya Remaja yang belum memiliki ketrampilan baik di bidang perbengkelan, komonikasi, dan tata boga.	Banyaknya pemuda-pemudi yang belum mempunyai pekerjaan tetap	Anak Remaja ada
3	Siguntur	Masih ada masyarakat yang belum mengerti tentang hukum	Kurangnya sosialisasi tentang KADARKUM	Masyarakat ada
4	Siguntur	Tidak adanya Gedung MDA	Tidak adanya Gedung MDA	Tenaga Matrial dan Lokasi

5	Siguntur	Masih Kurangnya anak mengaji tentang seni membaca al-quran	Kurang kepedulian orang tua terhadap pendidikan agama	Anak didik ada
6	Siguntur	Masih kurangnya insentif untuk guru mengaji	Masih kurangnya insentif untuk guru mengaji	Guru mengaji
7	Siguntur	Kurangnya pendanaan penyelenggaraan hari besar islam dan nasional	Kurang tersedia anggaran	Masyarakat
8	Jirat	Bangunan Surau Suluk Nagari (Surau Gadang) Rusak (tidak Layak Pakai)	Bangunan sudah tua	Masyarakat dan anak mengaji ada
9	Siguntur	Kurangnya TPA dan TPSA di Nagari Siguntur	Pembangunan TPA/TPSA	Anak Murid
10	Siguntur	Belum maksimalnya pembinaan pada Organisasi Bundo Kandung	Belum maksimalnya pembinaan pada Organisasi Bundo Kandung	Organisasi ada
11	Siguntur	Pengadaan Pelaminan selengkapnya (tenda kursi)	Pengadaan Pelaminan selengkapnya (tenda kursi)	Kelompok ada
12	Siguntur	Pelatihan adat istiadat bundo kandung	Pelatihan adat istiadat bundo kandung	Anggota ada
13	Siguntur	Pengadaan honor pelatih majelis taklim	Pelatihan adat istiadat bundo kandung	Anggota ada
14	Siguntur	Pelatihan menjahit (honor Pelatih)	Pelatihan menjahit (honor Pelatih)	Anggota ada
15	Siguntur	Seperangkat alat musik untuk pemuda	Seperangkat alat musik untuk pemuda	Anggota ada
16	Siguntur	Belum terbinanya kesenian tradisional Nagari (Rabana Zikir,Talempong, Randai dll	Belum terbinanya kesenian tradisional Nagari (Rabana Zikir,Talempong, Randai dll	Kelompok kesenian ada
17	Siguntur	Masih kurangnya Pembekalan SDM terhadap Lembaga yang ada	Masih kurangnya Pembekalan SDM terhadap Lembaga yang ada	Lembaga ada, tokoh masyarakat ada
18	Siguntur	Kurangnya pelatihan terhadap PKK Nagari	Kurangnya pelatihan terhadap PKK Nagari	PKK ada

19	Siguntur	Kurangnya keterampilan usia produktif	Kurangnya keterampilan usia produktif	Kelompok ada
		1.10. Urusan Wajib Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah sbb :		
1	Siguntur	Masih kurangnya modal usaha kecil dan menengah bagi kaum ibu		Kelompok ada
2	Koto	Belum adanya bangunan pasar nagari	Belum adanya bangunan pasar nagari	Tenaga Matrial dan Lokasi
		2. URUSAN PILIHAN		
		2.1. Urusan Pilihan Pertanian sbb:		
1	Siguntur	Masih Kurangnya Jalan usaha Tani	Masih Kurangnya Jalan usaha Tani	Tenaga dan Matrial
2	Jirat	Jalan usaha Tani Kurao ke Batu Bagatok belum tersambung	Jalan usaha Tani Kurao ke Batu Bagatok belum tersambung	Tenaga dan Matrial
3	Siguntur	Masih kurangnya prasarana pegolahan tanah pertanian	Masih kurangnya prasarana pegolahan tanah pertanian	Tenaga ada, lokasi juga ada
4	Siguntur	Masih adanya lahan kritis	Masih adanya lahan kritis	Tenaga ada
5	Siguntur	Masih kurang hasil pertanian	Masih kurang hasil pertanian	Tenaga ada, lokasi juga ada
6	Siguntur	Masih adanya lahan persawahan yang belum digarap	Masih adanya lahan persawahan yang belum digarap	Lahan dan Tenaga
7	Siguntur	Belum adanya alat-alat Petanian	Belum adanya alat-alat Petanian	Petani ada dan lahan ada
8	Siguntur	Semakin kurangnya alat Produksi Gambir (Produksi maksimal)	Semakin kurangnya alat Produksi Gambir (Produksi maksimal)	Lahan ada, Petani ada

9	Siguntur	Masih banyaknya sarana pengairan irigasi sawah yang rusak dan tidak memadai	Masih banyaknya sarana pengairan irigasi sawah yang rusak dan tidak memadai	Lahan ada, petani ada
10	Siguntur	Masih kurangnya alat-alat pengolah sawah (masin Bajak/Hand Traktor)	Masih kurangnya alat-alat pengolah sawah (masin Bajak/Hand Traktor)	Lahan ada, petani ada
11	Siguntur	Masih susah petani mendapatkan bibit, pupuk dan obat-obatan	Masih susah petani mendapatkan bibit, pupuk dan obat-obatan	Lahan ada, petani ada
12	Siguntur	Tidak adanya bibit sawit	Tidak adanya bibit sawit	Lahan ada, Petani ada
13	Siguntur	Tidak ada Bibit Karet, Cangkeh, Pala dan Gahru	Tidak ada bibit karet, Cangkeh, Pala dan Gahru	Lahan ada, Petani ada
14	Siguntur	Tidak ada Hand traktor / Perontok Gabah	Tidak ada Hand Traktor/Perontok Gabah	Lahan ada, Petani ada
		2.2. Urusan Pilihan Peternakan dan Perikanan sbb:		
1	Siguntur	Belum profesionalnya pengelolaan budi daya ikan.	Belum profesionalnya pengelolaan budi daya ikan.	Tenaga ada, lokasi juga ada
2	Siguntur	Belum profesionalnya pengelolaan ternak sapi	Belum profesionalnya pengelolaan ternak sapi	Tenaga ada, lokasi juga ada
3	Siguntur	Pembuatan ikan air tawar larangan	Pembuatan ikan air tawar larangan	Tempat ada



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
NAGARI SIGUNTUR**

KEPUTUSAN

**WALI NAGARI SIGUNTUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
Nomor : 140 / /KPTS-WN SGT/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJM NAGARI
TAHUN 2018-2024**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Pemerintah Nagari berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPNag) yang merupakan penjabaran dari RPJMNag
 - b. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJMNag
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim

Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (Tim Penyusun RPJMNag).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten No. Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) Tahun 2015 – 2021 sebagai berikut :

Pembina	:1 HERPENDI, ST	(Wali Nagari)
Ketua	:2 SYAFRUL, S. IP	(Sekretaris Nagari)
Sekretaris	:3 RISKI RAMADANU	(Ketua LPMN)
	4 YANDRI KISWANTO	(Aparatur Desa)
	5 ARTION	(Kepala Kampung)
	6 WENDI PERMANA	(Kepala Kampung)
	7 ROBI BINUR	(Pemuda)
	11 HERLITA	(Unsur Perempuan)

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RPJMDes adalah menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) tahun 2015 – 2021 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Nagari (PKN) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJMDNag mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Permendes PDT dan Trans No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans No.5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015..

- Keempat : Tim Penyusun RPJMNag dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RPJMNag terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari (Pernag) tentang RPJMNag tahun 2015 – 2021 oleh .
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Siguntur

Pada Tanggal : 04 September 2019

Wali Nagari Siguntur

